

ABSTRAK

DEDEN TAUFIK : Potensi dan Peluang Pemekaran Kabupaten Sukabumi Hubungannya dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan keinginan dari sebagian masyarakat di Kabupaten Sukabumi terhadap rencana pemekaran Daerah Otonom Baru antara Kabupaten Sukabumi utara dan Kabupaten Sukabumi. sampai saat ini belum terlaksana, adapun permasalahan yang akan di jawab pada penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan pengaturan pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia, bagaimana potensi dan peluang pemekaran Kabupaten Sukabumi menurut Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007, bagaimana Implikasi pemekaran daerah otonomi baru terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Penelitian ini dimulai dari memperoleh data pada Pebruari sampai Maret 2015 di Wilayah Kabupaten Sukabumi, metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan dua bagian yaitu pengumpulan data primer melalui pengamatan (*obsevasi*) langsung dan wawancara sedangkan pengumpulan data sekunder melalui penelitian dan kajian terhadap dokumen atau literature. dimana data yang dikumpulkan dipadu dan dikaji berdasarkan norma dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif mengingat dalam penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya rencana pemekaran daerah kabupaten sukabumi berdasarkan Perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Pengabungan Daerah serta efektivitas dalam pengimplementasian peraturan tersebut di lapangan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa proses rencana pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Sukabumi sesuai dengan alur yang telah ditetapkan secara normative menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Pengabungan Daerah. namun ada hal lain tim presidium tidak memaksimalkan hak inisiatif DPR untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten, hal tersebut akhirnya tidak menghasilkan pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara dan masuk program legislasi Nasional pada tahun 2009, tidak seperti daerah pada saat bersamaan dimekarkan. hal tersebutlah yang memudahkan pembentukan Kabupaten pangandaran. secara administratif teknis dan fisik Kewilayahan Kabupaten Sukabumi secara eksplisit telah sesuai dan mendapatkan kategori “direkomendasikan” untuk dibentuk sebagai daerah otonom baru.

Adapun faktor-faktor yang mewarnai proses pembentukan Kabupaten Sukabumi lebih didominasi oleh faktor pendukung dibandingkan dengan faktor-faktor yang menghambat pembentukan, meskipun secara kajian pembentukannya berjalan belum sesuai dengan yang diharapkan, beberapa kebijakan pemerintah yang menghambat jalannya proses, sebut saja kebijakan moratorium pemekaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pemekaran Kabupaten sukabumi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 dan telah layak dimekarkan sementara kendalanya adalah dengan Moratorium.

Kata Kunci: Pemekaran, Kabupaten Sukabumi, Kesejahteraan, Direkomendasikan, Moratorium.

ABSTRACT

DEDED TAUFIK : Potential and Opportunity Expansion of Sukabumi relationship with Government Regulation No. 78 of 2007 and Its Effect on Public Welfare .

This research is motivated by the desire of some people in Sukabumi against expansion plan New Autonomous Region between Sukabumi north and Sukabumi . has yet to materialize , as for the issues to be in charge of this research is how policy-setting expansion of new autonomous regions in Indonesia , how the potential and expansion opportunities Sukabumi according to Government Regulation No.78 Year 2007, how the implications of the new autonomous region expansion of the welfare people in Sukabumi .

This study starts from obtaining the data in February and March 2015 in Sukabumi regency , the method used in this study by using two parts, namely the collection of primary data through observation (observation) direct and interviews while secondary data collection through research and study of the documents or literature , where the data were collected , combined and assessed based on norms and / or regulations in force and presented in the form of qualitative description given in this penelitian only aims to determine whether or not the expansion plan in accordance district sukabumi based legislation in this case is the Government Regulation No. 78 of 2007 on Procedures for the Establishment , Abolition , and Pengabungan Regions and effectiveness in the implementation of these regulations in the field.

The conclusion that can be drawn from this study is that the process of formation of new autonomous regions plan Sukabumi in accordance with a predetermined groove is normative according to Government Regulation No. 78 Year 2007 on Procedures for the Establishment , Abolition , and Pengabungan Regions. but there are other things presidium team does not maximize the DPR initiative to fight for district expansion , it is ultimately not produce Sukabumi division North and entered a program national legislation in 2009 , did not like the area at the same time expanded . it is exactly what allows the formation of the District Pangandaran . technical administrative and physical territorial explicitly Sukabumi compliance and gain the category "recommended " to set up a new autonomous region .

The conclusion that can be drawn from this study is that the process of formation of new autonomous regions plan Sukabumi in accordance with a predetermined groove is normative according to Government Regulation No. 78 Year 2007 on Procedures for the Establishment , Abolition , and Pengabungan Regions. but there are other things presidium team does not maximize the DPR initiative to fight for district expansion , it is ultimately not produce Sukabumi division North and entered a program national legislation in 2009 , did not like the area at the same time expanded . it is exactly what allows the formation of the District Pangandaran . technical administrative and physical territorial explicitly Sukabumi compliance and gain the category "recommended " to set up a new autonomous region .

Keywords : Expansion , Sukabumi , Welfare , Recommended, Moratorium.

ABSTRACT

DEDEN TAUFIK : The Potential and Appportunity Unfoldment Regency of Sukabumi it Relationship with the Government Regulation of Number 78 year 2007 and Influence it to the People of Welfare.

The background of the research is willing to from one of society residence in government Sukabumi regency to split of territorial sukabumi regency between the north sukabumi regency and prime government sukabumi regency. as far as at the moment this implementative not yet, there is will answer the problems to this research be how policy systematization the recent autonomy of territorial in Indonesian, how the potential an appportunity Unfoldment Regency of Sukabumi it Relationship with the Government Regulation of Number 78 year 2007 is follow, and how implication the recent autonomy of territorial Influence it to the People of Welfare.

The background of the research started from getting the date book to the month of pebruary arrive to 2015 march at sukabumi regency, The method used in this study was a mixing of the techniques of data collection was divided into two parts, namely the collection of primary data through direct observation and interviews, while the collection of secondary date through research and study of documents or literature. While the sampling method was purposive sampling that was done by retrieving samples from informants with particular considerations. where collection date with compact and examine norm and/or regulations happen and dishes laid out on the table in qualitative descriptive keep in mind the background of the research head for understand agree with or at the least to split of territorial sukabumi regency concerning be the Government Regulation of Number 78 year 2007. about formation of arrangement, wiping out and territory annexation within effectiveness at implementation that regulation in the range.

